PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH
JL. ONJE NO 1B TELP. (0281) 891059 - 891430- 891452
FAX. (0281) 891271 PURBALINGGA 53316

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2 /15006

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mengisi lowongan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga membuka kesempatan bagi Putra-Putri Terbaik Bangsa yang memenuhi syarat, untuk mengikuti Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

II. KEBUTUHAN JABATAN

Jabatan	Kebutuhan Umum	Kebutuhan Khusus Disabilitas	Jumlah
Tenaga Teknis	**39**	**1**	**40**

Rincian kebutuhan jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada Lampiran 1 pengumuman ini.

III. JENIS KEBUTUHAN

1. Kebutuhan Umum adalah kebutuhan jabatan yang dapat dilamar oleh setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
2. Kebutuhan Khusus adalah kebutuhan jabatan yang dapat dilamar oleh setiap Warga Negara Republik Indonesia penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.

IV. PERSYARATAN

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
13. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
14. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama, dan pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
15. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan **pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00** (tiga koma nol nol);
16. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
17. Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

18. Pelamar penyandang disabilitas juga dapat melamar pada kebutuhan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
    b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan:
        1) Dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
        2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
19. Pelamar pada pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2023.
20. Ketentuan Unggah Dokumen

    Dokumen yang harus dilengkapi dan wajib diunggah/*upload* adalah :
    a. Scan **berwarna** Kartu Tanda Penduduk **Asli**/ Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (format jpeg/jpg ukuran max 200 kb);
    b. Scan **berwarna** Surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan tinta hitam, ditujukan kepada Bupati Purbalingga, **ditandatangani basah** dan menggunakan ***e-meterai*** **Rp10.000,00** (sesuai Lampiran II, format pdf ukuran max 300 kb);
    c. Scan **berwarna** Ijazah **Asli**/pengganti ijazah (bagi ijazah asli yang hilang/rusak) sesuai formasi jabatan yang dilamar (format pdf ukuran max 800 kb) ;
    d. Scan atau tangkapan layar Sertifikat/Surat Keputusan Akreditasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri **dan/atau** Sertifikat/Surat Keputusan Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT dan/atau PUSDIKNAKES/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    e. Scan **berwarna** Transkrip Nilai Akademik **Asli**/ pengganti Transkrip (bagi transkrip asli yang hilang/rusak) (format pdf ukuran max 600 kb);
    f. Scan **berwarna** Asli Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan masih dapat melakukan tugas kedinasan sesuai dengan formasi yang dilamar khusus pelamar disabilitas (format pdf ukuran max 600 kb) ;
    g. Scan **berwarna Asli** surat pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, **ditandatangani basah** dan menggunakan ***e-meterai*** **Rp10.000,00** (sesuai Lampiran III, format pdf ukuran maksimal 500kb);
    h. Pas foto terbaru **pakaian formal** ukuran 4 x 6 dengan **latar belakang warna merah** (format jpeg/jpg ukuran max 200 kb);
21. Tata Cara Pendaftaran
    a. Calon pelamar seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 melakukan pendaftaran secara *online* melalui Portal SSCASN 2024 dengan alamat **https://sscasn.bkn.go.id;**

b. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
c. Calon pelamar seleksi pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 wajib memiliki akun Surat Elektronik (*email*) **yang masih aktif/berlaku;**
d. Calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Calon Pelamar, Nomor Kartu Keluarga, dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
e. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan E-KTP pelamar atau melalui *helpdesk* SSCASN BKN;
f. Pendaftaran di Portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk Akun Calon Peserta Seleksi dan Pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan;
g. Pelamar harus mencetak **Kartu Informasi Akun** sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024 dan simpan kartu tersebut dengan baik;
h. Pelamar login menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan di Portal SSCASN untuk pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman;
i. Pelamar harus mencetak Kartu Pendaftaran PNS tahun 2024;
j. Semua data yang diisikan pada formulir pendaftaran dalam SSCASN **harus** didasarkan dokumen asli dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tersebut ternyata tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
k. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi;
l. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran melalui SSCASN dapat dilihat atau diunduh di laman:
    a. https://sscasn.bkn.go.id.
    b. https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id.;
    c. https://web.facebook.com/BKPPDPurbalingga
    d. https://t.me/BKPPDPurbalingga
    e. https://www.instagram.com/bkpsdm_pbg/

V. DESKRIPSI JABATAN DAN RENTANG PENGHASILAN

Deskripsi jabatan dan rentang penghasilan dapat dilihat pada link https://bit.ly/DeskripsiJabdanPenghasilan

VI. SELEKSI DAN PENENTUAN KELULUSAN

Tahapan seleksi pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri atas 3 tahap dengan sistem gugur meliputi :

1. Seleksi Administrasi

a. Seleksi Administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pelamar yang diunggah pada https://sscasn.bkn.go.id;

b. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id;

c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* https://sscasn.bkn.go.id.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*

a. Pengumuman dan jadwal SKD dapat dilihat melalui situs https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id

b. Syarat mengikuti SKD dengan membawa:

1) Asli e-KTP/Surat Keterangan perekaman e-KTP;

2) Asli Kartu tanda peserta ujian.

c. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada nomor 2 huruf b, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;

d. Peserta ujian mengenakan pakaian kemeja/atasan putih lengan panjang dan bawahan (rok/celana) hitam dan sepatu pantofel hitam (**tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana *jeans* dan *training***);

e. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa :

1) Buku-buku dan catatan lainnya;

2) Kalkulator, telepon genggam (HP), dompet, tas, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, *ballpoint*, *headset*, perhiasan dan peralatan dari logam lainnya ;

3) Makanan, minuman dan rokok;

4) Senjata api/tajam dan sejenisnya.

f. Peserta hadir **120 menit sebelum waktu ujian,** peserta yang tidak hadir untuk mengikuti tes sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan ***GUGUR.***

g. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT terdiri dari:

1) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);

2) Tes Intelegensi Umum (TIU);

3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

h. Penetapan Nilai Ambang Batas (NAB) SKD, yaitu:

No.	Jenis Kebutuhan	Materi SKD						Total Nilai Kumulatif
		TWK		TIU		TKP		
		NAB	Soal	NAB	Soal	NAB	Soal	
1	Umum	65	30	80	35	166	45	311
2	Disabilitas	-	30	60	35	-	45	286

2) Ketentuan Penggunaan Nilai SKD tahun anggaran 2023 dalam pengadaan PNS tahun anggaran 2024

a. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;

2. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang

digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;

3. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
4. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
5. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
6. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.

b. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 **tidak dapat mengikuti SKD** tahun anggaran 2024;

c. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*

a. Pengumuman dan jadwal SKB dapat dilihat di situs *online* *https://sscasn.bkn.go.id* dan https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id;

b. Peserta dan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1) Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.
2) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan CAT;

4. Pengolahan Hasil Seleksi

a. Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yaitu:

1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%;

b. Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan hasilnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

5. Prinsip kelulusan

a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari Panselnas dan diumumkan melalui https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id atau https://sscasn.bkn.go.id;

b. Apabila peserta seleksi memperoleh **nilai kelulusan yang sama** setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :

1) Nilai Total Hasil SKD yang lebih tinggi;
2) Apabila angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
3) Apabila angka 2) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana;

4) Apabila angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

d. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan

2) bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.

e. Dalam hal Instansi Pemerintah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (d) masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik, **dikecualikan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.**

VII. LAIN-LAIN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan kemudian melalui https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id;
2. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi pengadaan pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Purbalingga **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
3. Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai PNS Tahun Anggaran 2024;
4. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat menjadi Pegawai ASN, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib;
5. Bagi pelamar yang terbukti melakukan per-JOKI-an dinyatakan **TIDAK LULUS/GUGUR** dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi pengadaan pegawai PNS

Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat dalam situs *online* https://sscasn.bkn.go.id atau https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id;

7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi:
   a. Helpdesk SSCASN : https://sscasn.bkn.go.id
   b. *Call center* dan *Helpdesk* Seleksi Pengadaan Pegawai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga:
      Telepon : **0281-891334**
      Facebook : https://web.facebook.com/BKPPDPurbali
      Telegram : https://t.me/BKPPDPurbalingga
      Instagram : https://www.instagram.com/bkpsdm_pbg/

VIII. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PNS

No	Kegiatan	Tanggal *)
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
16	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
17	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
18	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
19	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
20	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024

21	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
22	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
23	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
24	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
25	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
26	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
27	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
28	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024,

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SETDA

HERNI SULASTI, SH., M.H., C.Fr.A
Pembina Utama Madya
NIP. 19670610 199503 2 002

Lampiran I :Pengumuman Panitia Seleksi Instansi
Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Kab. Purbalingga
Nomor : 800.1.2.2/ 15006
Tanggal : 19 Agustus 2024

RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA PADA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
			Umum	Disabilitas	
1	2	3	4	5	6
Jumlah			**39**	**1**	
1,	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D- IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA	1		BADAN KEUANGAN DAERAH-BIDANG AKUNTANSI DAN ASET-SUB BIDANG AKUNTANSI
2,	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D- IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK / S-1 ADMINISTRASI PAJAK / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN PAJAK / S-1 MATEMATIKA / S-1 STATISTIKA	1		BADAN KEUANGAN DAERAH-BIDANG PERBENDAHARAAN-SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
3,	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1		KECAMATAN KEMANGKON-SEKSI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4,	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1		KECAMATAN BOBOTSARI-KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5,	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1		KECAMATAN BUKATEJA- SEKSI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6,	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1		KECAMATAN PURBALINGGA-SEKSI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7,	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN		1	KECAMATAN KALIMANAH- SEKSI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8,	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	1		KECAMATAN BOJONGSARI-SEKSI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

9,	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1		DINAS TENAGA KERJA-SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA-SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
10,	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK-SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK-SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN
11,	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN-SEKRETARIAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
12,	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III HYGIENE PANGAN / D-III KESEHATAN HEWAN / D-III KESEHATAN TERNAK / D-III PARAMEDIK VETERINER / D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA / D-III TEKNISI MEDIS VETERINER	2		DINAS PERTANIAN-UPTD PUSKESWAN
13,	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI	2		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK-UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
14,	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA / S-1 BIOLOGI / S-1 FISIKA / S-1 KIMIA / S-1 STATISTIKA / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 SASTRA KOREA / S-1 SASTRA TIONGKOK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN / D-IV KIMIA INDUSTRI / D-IV KIMIA TERAPAN / D-IV SISTEM INFORMASI INDUSTRI OTOMOTIF / S-1 BAHASA INGGRIS / S-1 SASTRA INGGRIS	1		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
15,	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1		BADAN KEUANGAN DAERAH-SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAERAH-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

16,	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN	1		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17,	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK / S-2 TEKNIK INFORMATIKA / S-2 TEKNIK SIPIL / S-2 TEKNIK LINGKUNGAN / S-2 TEKNIK SUMBER DAYA AIR / S-2 TEKNIK PERTANIAN / S-2 TEKNIK PANGAN	1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH-BIDANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
18,	PENGAMAT TERA TERAMPIL	D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI / D-III MANAJEMEN / D- III METROLOGI DAN INSTRUMENTASI / D-III TEKNOLOGI ELEKTRONIKA / D-III TEKNOLOGI INDUSTRI / D-III TEKNOLOGI INSTRUMENTASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI LISTRIK / D-III TEKNOLOGI MESIN / D-III TEKNOLOGI OTOMASI / D-III TEKNOLOGI SIPIL	1		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN-UPTD METROLOGI LEGAL
19,	PENGAWAS KEMETROLOGIAN PERTAMA / AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 FISIKA / S-1 HUKUM / S-1 ILMU INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI / S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK MANUFAKTUR / S-1 TEKNIK MESIN	1		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN-UPTD METROLOGI LEGAL
20,	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TRANSPORTASI DARAT / D-IV TRANSPORTASI DARAT / D-IV ILMU MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT / S-1 TRANSPORTASI / D-IV ILMU TRANSPORTASI DARAT / D-IV MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT	1		DINAS PERHUBUNGAN-BIDANG LALU LINTAS-SEKSI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS
21,	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	S-1 TRANSPORTASI DARAT / D-IV TRANSPORTASI DARAT / S-1 TRANSPORTASI / D-IV ILMU TRANSPORTASI DARAT / D-IV MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT	1		DINAS PERHUBUNGAN-BIDANG LALU LINTAS-SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS
22,	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ARSITEKTUR	2		BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA-SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
23,	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ARSITEKTUR	2		BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA-SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

24,	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN / D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK / D-IV PENYULUHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN / D-IV RELASI INDUSTRI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN	1		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH-BIDANG UMKM
25,	PENGENDALI KEDARURATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 ILMU KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 REKAYASA KESELAMATAN INDUSTRI / S-1 TEKNIK KESELAMATAN DAN PROTEKSI KEBAKARAN	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
26,	PENGENDALI KEDARURATAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 ILMU KESEHATAN KERJA / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / S-1 REKAYASA KESELAMATAN INDUSTRI / S-1 TEKNIK KESELAMATAN DAN PROTEKSI KEBAKARAN	1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP-BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
27,	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT / D- IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	1		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA-BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
28,	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN / D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 AGRIBISNIS / S-1 AGROTEKNOLOGI / S-1 TEKNIK PERTANIAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN	1		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA-BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
29,	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1		BAGIAN HUKUM

30,	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	2		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH-BIDANG EKONOMI
31,	PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 SOSIOLOGI	1		SEKRETARIAT DPRD-BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
32,	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH-SEKSI PEMBINAAN & PENGAWASAN
33,	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
34,	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
35,	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN

SEKRETARIS DAERAH

Selaku

KETUA PANITIA SELEKSI INSTANSI
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2024,

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SETDA

HERNI SULASTI, SH., M.H., C.Fr.A
Pembina Utama Madya
NIP. 19670610 199503 2 002

Contoh SURAT LAMARAN
(berbahasa Indonesia, ditandatangani basah dan menggunakan e-meterai Rp10.000,00)

Lampiran II :Pengumuman Panitia Seleksi
Instansi Pengadaan Pegawai
Aparatur Sipil Negara
Kab. Purbalingga
Nomor : 800.1.2.2/15006
Tanggal : 19 Agustus 2024

……, ……2024

(tanggal sesuai pada saat peserta pilih/daftar instansi di potal SSCASN)

Kepada

Yth. Bupati Purbalingga

di –
Purbalingga

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	……
Tempat/Tanggal Lahir	:	…… , ……
Jenis kelamin	:	Pria/Wanita*
Pendidikan	:	…… (*sesuai dengan pendidikan yg dimiliki*)
Jabatan yang dilamar	:	……*(nama jabatan)*
		di ……*(unit kerja penempatan)*
Kebutuhan	:	Umum / Khusus*
No Handphone	:	……
Alamat	:	…… *(sesuai KTP)*

Dengan ini menyampaikan surat lamaran dan dokumen persyaratan agar dapat diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya upload adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Coret yang tidak perlu

……, tgl bulan tahun

e-meterai
Rp10.000

ttd

Nama Lengkap

Contoh
SURAT PERNYATAAN
(ditandatangani basah dan menggunakan e-meterai Rp10.000,00)

Lampiran III : Pengumuman Panitia Seleksi
Instansi Pengadaan Pegawai
Aparatur Sipil Negara
Kab. Purbalingga
Nomor : 800.1.2.2/15006
Tanggal : 19 Agustus 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan,

e-meterai
Rp10.000

ttd

Nama Lengkap